



Analisis Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Dinda Dewi Santika^{1*}, Alya Putri Aiska², Aisyah Tiara Kusuma³, Gustina Masitoh⁴,
Feri Kurniawan⁵

¹⁻⁵ Universitas Nurul Huda, Desa Tanah Merah, Kecamatan Belitang Madang Raya

Email : dindadewisantika0313@gmail.com^{1*}, gustina@unuha.ac.id²

Alamat : Jl. Kota Baru, Sukaraja, Kec. Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Sumatera Selatan

Korespondensi penulis : dindadewisantika0313@gmail.com

Abstract. Inflation is an increase in the price of goods and services widely and sustainably in a certain period of time. Inflation has a significant influence on the economic growth of country, including Indonesia. The high level of inflation can cause instability in Indonesia's economic growth. Interest rates are expenses and payments paid banks to customers who make product purchase and sale transactions. generally interest rates are calculated according to a certain percentage within a certain period of time. In addition, interest rates also function as one of the aspects that influence the development and economic growth in Indonesia, both for the public and investors. This study aims to analyze the effect of inflation and interest rates on economic growth in Indonesia. The method used is a literature study with a descriptive qualitative approach. The results showed that inflation and interest rates had a positive influence on economic growth in Indonesia. Economic growth is reflected in increasing economic capacity in producing goods and services. Therefore, inflation control and interest rates are very important in encouraging economic growth. Strategies are needed to optimize the use of domestic products and improve export tariffs and limiting certain goods imports. The negative impact of inflation on the country's economy includes the potential to decrease the welfare of the community, especially permanent income groups, due to the increase in price of goods that are not matched by increased income. In addition, inflation can worsen income inequality, thereby reducing the purchasing power of permanent income people.

Keywords: Inflation, Interest Rates, Economic Growth

Abstrak. Inflasi adalah peningkatan harga barang serta jasa secara luas serta berkelanjutan pada periode waktu tertentu. Inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Tingginya tingkat inflasi dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Suku bunga merupakan pengeluaran dan bayaran yang dibayar oleh bank pada nasabah yang melakukan transaksi pembelian dan penjualan produk. Umumnya, suku bunga dikalkulasi menurut persentase tertentu dalam jangka waktu tertentu. Di samping itu, suku bunga pula berfungsi sebagai satu di antara aspek yang memengaruhi perkembangan serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia, baik bagi khalayak maupun para investor. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis pengaruh inflasi dan tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode yang digunakan ialah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya inflasi dan suku bunga memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tercermin dari peningkatan kapasitas perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu, pengendalian inflasi dan tingkat suku bunga menjadi hal yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Diperlukan strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan produk dalam negeri serta meningkatkan kinerja ekspor melalui pemberian insentif, seperti penurunan tarif ekspor dan pembatasan impor barang tertentu. Dampak negatif inflasi terhadap perekonomian negara meliputi potensi penurunan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan tetap, akibat kenaikan harga barang yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Selain itu, inflasi dapat memperburuk ketimpangan pendapatan, sehingga mengurangi daya beli masyarakat berpenghasilan tetap.

Kata kunci: Inflasi, Suku Bunga, Pertumbuhan Ekonomi

1. LATAR BELAKANG

Selama kurun waktu setengah abad terakhir, perhatian utama masyarakat dalam ranah ekonomi global secara konsisten terfokus pada upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional. Para ahli ekonomi, akademisi, serta para pengambil kebijakan dan politisi dari berbagai belahan dunia menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap isu ini, dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan. Setiap akhir tahun, negara-negara di seluruh dunia diwajibkan untuk menghimpun, menganalisis, serta mengonsolidasikan data dan statistik ekonomi yang dimiliki, dengan fokus utama pada indikator penting seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian ekonomi nasional. Dengan semangat dan harapan yang tinggi, masing-masing negara menantikan hasil berupa angka-angka pertumbuhan dan pola tren yang menunjukkan perbaikan dan kemajuan ekonomi yang signifikan dari tahun ke tahun.

Tujuan pembangunan telah ditetapkan untuk mendorong kemajuan ekonomi di Indonesia. Salah satu tujuan tersebut adalah agar pertumbuhan ekonomi rata-rata Indonesia berada di atas 5,11% per tahun selama periode penelitian. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat signifikan. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan partisipasi banyak orang, seperti warga negara, pemerintah, pelaku ekonomi, dan orang asing.

Dalam setiap struktur pemerintahan di tingkat daerah, perhatian tidak hanya terfokus pada pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata. Pemerintah daerah juga menaruh perhatian besar terhadap percepatan laju perkembangan ekonomi, karena pertumbuhan yang cepat dapat membuka peluang yang luas untuk memperluas standar hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan standar hidup masyarakat bukan hanya terlihat dari naiknya pendapatan per kapita, tetapi juga tercermin dalam semakin besarnya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap ketersediaan layanan publik dan barang konsumsi yang lebih berkualitas serta dalam jumlah yang memadai. Tuntutan ini merupakan indikator bahwa masyarakat mengalami kemajuan dalam hal sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, penyediaan berbagai jenis barang dan jasa dengan mutu yang tinggi menjadi tanggung jawab utama yang harus diemban oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa karakteristik mendasar dari barang dan layanan tersebut bersifat publik, yang artinya bukan hanya ditujukan untuk kelompok tertentu saja, melainkan diperuntukkan bagi seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali, demi menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Tingkat ketersediaan dan kualitas fasilitas publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat di suatu negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan jumlah dana atau anggaran yang harus dialokasikan dan dibelanjakan oleh pemerintah. Secara umum, pengeluaran pemerintah mencerminkan sejauh mana kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan, program, serta layanan yang menjadi bagian dari fungsi dan tanggung jawab pemerintahan. Dalam kerangka sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengeluaran ini secara garis besar diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Pertama adalah belanja rutin, yang mencakup pembiayaan kegiatan operasional dan administrasi pemerintahan sehari-hari, seperti gaji pegawai negeri dan biaya perawatan fasilitas. Kedua adalah belanja pembangunan, yang diarahkan untuk mendanai proyek-proyek dan inisiatif strategis yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, untuk membiayai berbagai pengeluaran tersebut, negara memperoleh pendapatan, yang mayoritas bersumber dari penerimaan dalam negeri. Penerimaan ini sering disebut sebagai penerimaan pembangunan karena berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program-program pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Apabila ditinjau dari sudut pandang tujuannya, belanja rutin merupakan jenis pengeluaran pemerintah yang bersifat operasional, wajib dilakukan secara berkala, dan dalam banyak hal cenderung memiliki karakteristik konsumtif. Meskipun demikian, tidak semua komponen dari belanja rutin dapat secara otomatis digolongkan sebagai pengeluaran konsumsi. Sebagai contoh, pembiayaan yang digunakan untuk membeli peralatan dan perlengkapan kantor, atau biaya yang dialokasikan untuk pemeliharaan dan perawatan gedung-gedung milik pemerintah, lebih tepat dikategorikan sebagai pengeluaran yang bersifat mendukung fungsi operasional pemerintahan, bukan konsumsi langsung oleh individu atau kelompok tertentu. Secara keseluruhan, struktur pengeluaran pemerintah secara umum terdiri atas dua komponen utama. Pertama adalah pengeluaran rutin, yang meliputi seluruh kebutuhan operasional harian yang diperlukan agar roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif. Kedua adalah pengeluaran pembangunan, yaitu anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai proyek pembangunan, baik yang bersifat fisik seperti infrastruktur, maupun yang bersifat sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Kedua jenis pengeluaran ini, baik rutin maupun pembangunan, dalam beberapa kondisi dapat termasuk ke dalam kategori pengeluaran konsumsi, tergantung pada bagaimana dan untuk apa dana tersebut digunakan secara spesifik.

Khususnya dinegara-negara berkembang, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat barang publik murni seperti jaringan energi atau

pertahanan yang biasanya tidak bisa disediakan oleh sektor swasta. Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk sektor sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan untuk semua pengeluaran ini dilakukan berdasarkan prinsip kemampuan membayar, namun sayangnya, banyak negara berkembang menghadapi keterbatasan dalam hal penerimaan negara. Hal ini menyebabkan tekanan fiskal yang tinggi, bahkan bisa memicu defisit anggaran, karena kebutuhan pengeluaran terus meningkat sementara kemampuan finansial negara belum memadai.

2. KAJIAN TEORITIS

Inflasi

Inflasi merupakan kondisi di mana terjadi peningkatan harga barang secara berkelanjutan, atau situasi ekonomi yang mencerminkan adanya tren kenaikan harga secara menyeluruh. Dikatakan tingkat harga umum, karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat beragam sehingga sebagian besar dari harga-harga barang tersebut selalu meningkat dan mengakibatkan terjadinya inflasi. Laju inflasi merupakan perubahan tingkat inflasi, baik meningkat maupun menurun, dari satu periode ke periode berikutnya atau dari tahun ke tahun.

Jika dilihat dari perspektif tujuannya, belanja rutin dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang memiliki karakteristik operasional dan bersifat wajib, yang artinya harus dilakukan secara berkesinambungan dan dalam jangka waktu tertentu, baik mingguan, bulanan, maupun tahunan. Pengeluaran ini umumnya diperlukan untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan aktivitas pemerintahan sehari-hari. Dalam praktiknya, jenis belanja ini sering kali diasosiasikan dengan sifat konsumtif, karena tidak secara langsung menghasilkan aset atau nilai ekonomi yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa tidak semua elemen atau komponen dari belanja rutin dapat serta-merta diklasifikasikan sebagai konsumsi dalam arti sempit. Sebagai ilustrasi, dana yang dialokasikan untuk pengadaan peralatan kantor, seperti komputer, meja kerja, atau alat tulis, serta anggaran yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan gedung-gedung pemerintah, memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional lembaga pemerintahan. Dengan kata lain, meskipun tidak menciptakan infrastruktur besar, pengeluaran tersebut tidak dapat dianggap sebagai konsumsi langsung oleh individu atau kelompok, karena tujuan utamanya adalah untuk menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan publik oleh aparatur negara.

Secara umum, struktur pengeluaran dalam keuangan negara dapat dibagi ke dalam dua kategori besar. Kategori pertama adalah belanja rutin, yang mencakup seluruh bentuk kebutuhan harian atau reguler dari instansi pemerintahan, baik dalam hal gaji pegawai, biaya listrik dan air, pemeliharaan aset, maupun kebutuhan operasional lainnya yang esensial agar sistem pemerintahan dapat berfungsi secara optimal. Kategori kedua adalah belanja pembangunan, yaitu anggaran yang diperuntukkan bagi pelaksanaan program-program pembangunan nasional, yang cakupannya bisa sangat luas. Program ini bisa berbentuk pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum, maupun pembangunan non-fisik yang menysasar sektor sosial, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat, atau program pemberdayaan masyarakat.

Perlu dicatat bahwa baik belanja rutin maupun belanja pembangunan, dalam praktiknya tidak selalu bisa dikotakkan secara kaku ke dalam kategori konsumsi atau investasi. Keduanya memiliki potensi untuk tergolong ke dalam pengeluaran konsumsi, tergantung pada sifat dan tujuan penggunaannya secara konkret. Jika dana yang dialokasikan digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat tanpa menciptakan nilai tambah jangka panjang, maka bisa digolongkan sebagai konsumsi. Namun jika dana tersebut berkontribusi pada peningkatan kapasitas pelayanan, efisiensi birokrasi, atau peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, maka sifatnya lebih cenderung kepada investasi pembangunan. Oleh karena itu, pengelompokan pengeluaran harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan dari masing-masing aktivitas belanja tersebut.

Inflasi dapat dikenali melalui tiga komponen utama yang saling berkaitan, yaitu adanya peningkatan harga, cakupan kenaikan yang meluas, serta sifatnya yang berlangsung terus-menerus dari waktu ke waktu. Pertama, elemen kenaikan harga mengindikasikan bahwa harga barang atau jasa pada periode tertentu, misalnya bulan ini, lebih tinggi dibandingkan dengan harga pada periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam nilai tukar mata uang terhadap barang atau jasa. Kedua, inflasi tidak hanya ditandai oleh naiknya harga satu atau dua jenis barang saja, melainkan mencerminkan kenaikan harga yang terjadi secara umum dan merata pada berbagai kelompok komoditas dalam perekonomian. Artinya, dampaknya dirasakan secara luas oleh masyarakat, mencakup berbagai sektor kebutuhan, baik barang konsumsi harian maupun barang penunjang lainnya. Ketiga, inflasi memiliki sifat berkelanjutan, yang berarti bahwa fenomena kenaikan harga tersebut harus berlangsung dalam rentang waktu tertentu agar dapat dikategorikan sebagai inflasi yang sesungguhnya. Kenaikan harga yang terjadi sesaat atau hanya dalam waktu singkat tidak cukup untuk disebut sebagai

inflasi. Umumnya, inflasi dianalisis dan diukur dalam jangka waktu minimal satu bulan. Apabila dalam kurun waktu tersebut terjadi peningkatan harga, maka akan dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk menilai apakah kenaikan tersebut bersifat menyeluruh dan konsisten, sehingga dapat ditetapkan sebagai gejala inflasi dalam perekonomian.

Inflasi murni merujuk pada kondisi kenaikan harga yang terjadi tanpa adanya intervensi dari pemerintah, baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter. Dalam situasi inflasi murni tingkat harga masih relatif terkendali dan belum menimbulkan dampak krisis pada sektor ekonomi. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi di kategorikan menjadi tiga jenis yaitu sedang, ganas, dan hiperinflasi. Inflasi sedang (*moderate inflation*) ditandai dengan kenaikan harga yang relatif lambat dan tidak signifikan dalam menimbulkan distorsi pasar terhadap pendapatan maupun harga relatif. Kendati demikian, inflasi jenis ini berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap. Inflasi ganas (*galloping inflation*) merupakan inflasi yang dapat menyebabkan rintangan ekonomi yang serius. Dalam keadaan ini, masyarakat cenderung menimbun barang, yang mengakibatkan keengganan untuk menabung karena tingkat bunga bank lebih rendah dibandingkan laju inflasi. Hiperinflasi merupakan bentuk inflasi yang sangat parah, dengan tingkat kenaikan harga yang bisa mencapai ratusan hingga ribuan persen per tahun. Jenis inflasi ini tergolong berbahaya, merugikan, dan berpotensi menghancurkan perekonomian. Dalam kondisi hiperinflasi, stabilitas ekonomi menjadi sangat sulit untuk dijaga, bahkan ketika berbagai langkah kebijakan moneter dan fiskal telah diambil oleh pemerintah.

Inflasi menimbulkan beberapa efek, di antaranya: efek terhadap pendapatan (*Equity Effects*) bersifat distributif, di mana sebagian pihak lain diuntungkan. Individu dengan pendapatan tetap akan mengalami kerugian akibat inflasi. Sebagai ilustrasi, seseorang dengan penghasilan tetap sebesar Rp 500.000 per tahun akan mengalami penurunan pendapatan riil sebesar Rp 50.000 jika tingkat inflasi mencapai 10%. Dampak inflasi terhadap efisiensi, yang dikenal sebagai *Efficiency Effects*, tercermin dari kemampuannya dalam mengubah cara distribusi atau alokasi faktor-faktor produksi dalam perekonomian. Perubahan ini umumnya dipicu oleh meningkatnya permintaan terhadap berbagai macam barang dan jasa selama periode inflasi. Lonjakan permintaan tersebut kemudian mendorong terjadinya penyesuaian dalam struktur produksi, yang sering kali menyebabkan sumber daya—seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku—tidak lagi digunakan secara optimal. Akibatnya, proses alokasi sumber daya menjadi kurang efisien, karena tidak lagi mencerminkan kebutuhan atau produktivitas riil dalam perekonomian. Sementara itu, pengaruh terhadap output (Output

Effects) dianalisis dengan asumsi bahwa tingkat output tetap, untuk melihat bagaimana inflasi memengaruhi distribusi pendapatan dan efisiensi dalam kondisi output yang tidak berubah.

Pada dasarnya, tidak semua jenis inflasi memberikan efek negatif terhadap perekonomian. Inflasi yang tergolong ringan, khususnya yang tingkatnya berada di bawah sepuluh persen, justru dapat berperan sebagai pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena inflasi pada tingkat rendah dapat menjadi motivasi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan produksi. Kenaikan harga memberikan peluang keuntungan yang lebih besar, yang pada gilirannya mendorong ekspansi usaha. Peningkatan aktivitas produksi ini juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru. Namun, ketika inflasi melebihi angka sepuluh persen, dampaknya mulai bersifat merugikan.

Suku Bunga

Menurut Sunariyah (2004), suku bunga didefinisikan sebagai harga atas pinjaman, yang merepresentasikan biaya sumber daya yang digunakan oleh peminjam dan wajib dibayarkan kepada pemberi pinjaman dan wajib dibayarkan kepada pemberi pinjaman. Suku bunga merupakan variabel ekonomi yang krusial dan senantiasa diamati dengan saksama karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari serta kondisi perekonomian secara keseluruhan masyarakat sehari-hari serta kondisi perekonomian secara keseluruhan. Secara garis besar, suku bunga dapat diartikan sebagai tingkat persentase tahunan yang dikenakan atas jumlah dana yang dipinjam oleh pihak peminjam. Pada intinya, suku bunga berfungsi layaknya harga dalam suatu transaksi keuangan, dan sebagaimana harga pada umumnya, ia memiliki peran penting dalam mekanisme pasar, baik di sektor pasar uang maupun pasar modal. Selain itu, suku bunga juga memiliki fungsi strategis sebagai instrumen untuk mengarahkan dan mengalokasikan penggunaan sumber daya yang tersedia dalam perekonomian, sehingga memengaruhi keputusan konsumsi, investasi, dan tabungan di masyarakat.

Tingkat suku bunga Bank Indonesia (SBI), yang kini lebih dikenal sebagai BI-Rate, merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia (BI). Instrumen ini digunakan untuk mengarahkan kondisi moneter dalam negeri agar selaras dengan tujuan ekonomi makro nasional. Setiap perubahan pada BI-Rate—baik berupa kenaikan maupun penurunan—akan memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat suku bunga antar bank serta suku bunga simpanan seperti deposito. Perubahan tersebut kemudian turut memengaruhi suku bunga kredit yang ditawarkan oleh perbankan kepada

masyarakat. Oleh karena itu, BI-Rate berfungsi sebagai indikator utama dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong aktivitas sektor riil dan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Sebagai contoh, ketika BI-Rate dinaikkan, hal ini biasanya akan diikuti oleh kenaikan suku bunga antar bank dan deposito, yang pada gilirannya menyebabkan suku bunga kredit ikut meningkat. Kondisi ini dapat menekan permintaan kredit dan konsumsi, sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika BI-Rate diturunkan, hal itu dapat memicu keluarnya aliran dana ke luar negeri karena imbal hasil investasi di dalam negeri menjadi kurang menarik. Situasi ini berpotensi menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan dapat mengganggu kestabilan ekonomi serta proses pemulihan atau pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Sunariyah (2004), suku bunga memiliki sejumlah fungsi penting dalam sistem perekonomian. Pertama, suku bunga berperan sebagai daya tarik bagi para penabung, khususnya mereka yang memiliki kelebihan dana, agar terdorong untuk menyimpan atau menginvestasikan dananya ke dalam instrumen keuangan. Dengan demikian, suku bunga menjadi insentif yang mendorong akumulasi dana dalam sistem perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Kedua, suku bunga juga digunakan sebagai salah satu instrumen utama dalam kebijakan moneter guna menciptakan keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan kebutuhan atau permintaan uang di masyarakat. Sebagai ilustrasi, pemerintah dapat menetapkan tingkat suku bunga yang lebih rendah pada sektor-sektor industri tertentu yang sedang diprioritaskan atau ingin didorong pertumbuhannya. Kebijakan ini memungkinkan perusahaan-perusahaan dalam sektor tersebut memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih murah, sehingga mendorong peningkatan investasi dan ekspansi usaha. Ketiga, suku bunga berfungsi sebagai alat kendali bagi pemerintah dalam mengatur jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Melalui penyesuaian tingkat suku bunga, pemerintah dapat memengaruhi kecepatan dan volume peredaran uang, sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Faktor-faktor utama yang memengaruhi penetapan besar kecilnya suku bunga adalah sebagai berikut: (1) Kebutuhan dana: apabila bank mengalami kekurangan dana sementara permintaan pinjaman meningkat, bank akan cenderung menaikkan suku bunga simpanan untuk menarik dana dengan cepat. Peningkatan suku bunga simpanan secara otomatis akan diikuti oleh peningkatan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, jika dana simpanan melimpah sementara permintaan pinjaman sedikit, suku bunga simpanan dapat diturunkan. (2) Persaingan: Dalam menghimpun dana simpanan, bank harus mempertimbangkan tingkat suku bunga yang

ditawarkan oleh bank lain. Jika rata-rata suku bunga simpanan di pasar sebesar 16%, maka bank yang ingin segera memperoleh dana disarankan untuk menawarkan suku bunga yang lebih tinggi dari rata-rata tersebut. Sebaliknya, untuk suku bunga pinjaman, bank sebaiknya menetapkan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaingnya. (3) Kebijakan pemerintah: Bank tidak diperbolehkan menetapkan suku bunga simpanan maupun pinjaman yang melebihi batas maksimum yang telah ditentukan oleh pemerintah. (4) Target keuntungan: Besarnya suku bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh target laba bank. Semakin besar keuntungan yang ingin dicapai, maka semakin tinggi pula suku bunga pinjaman yang akan diberlakukan begitu juga sebaliknya. (5) Jangka waktu: Suku bunga akan cenderung lebih tinggi untuk pinjaman dengan jangka waktu yang lebih panjang, karena risiko yang dihadapi di masa depan juga meningkat seiring bertambahnya durasi pinjaman.

Sebaliknya, pinjaman dengan jangka waktu yang lebih singkat umumnya dikenakan tingkat bunga yang relatif lebih rendah. Beberapa faktor lain yang signifikan dalam penentuan besaran suku bunga adalah: 1) Kualitas Jaminan: Semakin tinggi tingkat likuiditas dari jaminan yang diserahkan oleh calon peminjam, semakin rendah tingkat suku bunga yang akan dikenakan pada kredit yang diberikan. Sebagai contoh, sertifikat tanah yang dijadikan agunan akan memperlihatkan perbedaan dalam penetapan suku bunga jika dibandingkan dengan aset yang lebih mudah untuk dicairkan. Perbedaan utama antara kedua jenis jaminan ini terletak pada proses pencairannya ketika terjadi wanprestasi atau masalah dalam pembayaran pinjaman. Jaminan yang memiliki likuiditas tinggi, seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan, dapat lebih cepat dan lebih mudah diubah menjadi uang tunai dibandingkan dengan aset yang bersifat tetap atau tidak likuid, seperti tanah atau properti lainnya. Karena jaminan yang lebih likuid memberikan kecepatan dalam pencairan, bank atau lembaga keuangan cenderung merasa lebih aman dan menurunkan suku bunga pinjaman, mengingat risiko yang lebih rendah jika terjadi masalah dengan peminjam. 2) Reputasi Perusahaan: tingkat bonafiditas atau kredibilitas perusahaan yang mengajukan permohonan kredit memiliki pengaruh signifikan terhadap penetapan suku bunga. perusahaan dengan rekam jejak keuangan yang baik dan reputasi solid umumnya dianggap memiliki risiko gagal bayar yang lebih rendah, sehingga berpotensi mendapatkan suku bunga yang lebih kompetitif, dan sebaliknya. 3) Produk yang Kompetitif: produk atau proyek yang dibiayai oleh kredit dan memiliki daya saing tertinggi di pasar cenderung mendapatkan fasilitas suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif atau memiliki prospek pasar yang tidak pasti. 4) Hubungan Baik: lembaga perbankan umumnya mengklasifikasikan nasabahnya

berdasarkan tingkat keaktifan dan loyalitas. Nasabah utama atau primer, yang memiliki hubungan historis yang baik dan frekuensi transaksi yang tinggi,seringkali mendapatkan perlakuan khusus dalam penetapan suku bunga yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan nasabah biasa atau sekunder. 5) Jaminan dari Pihak Ketiga: Keberadaan pihak ketiga yang memberikan jaminan atas suatu pinjaman juga mempengaruhi besaran suku bunga yang dikenakan. Jika pihak yang memberikan pinjaman memiliki kondisi keuangan yang solid, reputasi yang baik, serta menunjukkan loyalitas terhadap bank, maka tingkat suku bunga yang diterapkan bisa lebih rendah atau berbeda. Namun, jika pihak ketiga yang memberikan jaminan dianggap kurang kredibel atau tidak dapat dipercaya, maka jaminan yang diberikan kemungkinan besar tidak akan dipertimbangkan oleh bank dalam proses pemberian kredit.

Peningkatan suku bunga merupakan salah satu langkah kebijakan moneter yang paling lazim diterapkan dan dinilai cukup efektif oleh bank sentral dalam upaya menahan laju inflasi. Ketika otoritas moneter memutuskan untuk menaikkan suku bunga, biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat, baik pelaku usaha maupun konsumen, untuk memperoleh pinjaman menjadi lebih tinggi. Akibatnya, kecenderungan masyarakat untuk melakukan pinjaman serta membelanjakan uangnya akan menurun. Penurunan aktivitas pinjaman dan konsumsi ini secara bertahap akan mengurangi jumlah uang yang beredar dalam sistem ekonomi. Seiring dengan menyusutnya likuiditas di pasar, tekanan terhadap kenaikan harga barang dan jasa pun dapat ditekan, sehingga proses inflasi dapat dikendalikan secara lebih efektif.

Sebaliknya, ketika bank sentral menurunkan tingkat suku bunga, biaya untuk meminjam dana menjadi lebih terjangkau. Hal ini menciptakan dorongan bagi masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan aktivitas peminjaman, baik untuk konsumsi maupun investasi. Kebijakan penurunan suku bunga umumnya dirancang sebagai stimulus guna mempercepat pemulihan ekonomi, khususnya ketika perekonomian sedang mengalami perlambatan. Suku bunga yang rendah memberikan keuntungan bagi investor karena menurunkan beban biaya pembiayaan, sehingga mendorong mereka untuk memperluas kapasitas usaha atau menjalankan proyek-proyek investasi baru. Di sisi lain, konsumen pun cenderung meningkatkan pengeluarannya karena akses terhadap sumber dana menjadi lebih mudah dan murah.

Peningkatan konsumsi masyarakat serta pertumbuhan investasi dari sektor swasta ini akan berkontribusi terhadap peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional. Dengan demikian, output ekonomi mengalami pertumbuhan. Dalam proses tersebut, permintaan terhadap tenaga kerja biasanya ikut meningkat, sehingga tercipta peluang kerja baru yang dapat

mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, lingkungan suku bunga rendah juga sering kali mendorong pertumbuhan aktivitas di pasar modal. Hal ini terjadi karena para investor mencari alternatif investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan instrumen simpanan berisiko rendah, seperti deposito. Akibatnya, minat terhadap saham dan produk investasi lainnya cenderung meningkat, yang selanjutnya memperkuat dinamika dan likuiditas pasar keuangan.

Meskipun demikian, penerapan kebijakan suku bunga yang tinggi tidak selalu memberikan dampak positif, karena juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Salah satu dampak utamanya adalah meningkatnya biaya modal atau *cost of money*, yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Kenaikan biaya ini dapat menghambat investasi serta memperlambat ekspansi usaha, terutama di sektor-sektor yang sangat bergantung pada pembiayaan. Selain itu, suku bunga tinggi juga berpotensi menurunkan daya saing produk ekspor di pasar internasional, karena biaya produksi yang meningkat membuat harga barang menjadi kurang kompetitif dibandingkan negara lain dengan suku bunga yang lebih rendah. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan semangat dunia usaha untuk melakukan investasi dalam negeri, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan produksi dan stagnasi pertumbuhan ekonomi (Boediono, 1990). Menghadapi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengambil kebijakan yang tepat guna memperbaiki dan meningkatkan struktur serta kualitas perbankan Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan adanya peningkatan dalam pendapatan nasional serta kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Untuk mengukur atau memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi, indikator utama yang biasanya digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencerminkan total nilai produksi yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga sering dijadikan sebagai salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan proses pembangunan yang dijalankan oleh suatu negara. Saat ini, banyak negara berupaya mempercepat kecepatan pertumbuhan ekonominya dengan mendorong peningkatan output secara berkelanjutan melewati penyediaan barang modal, penerapan teknologi, serta pengembangan SDM.

Pada konteks ekonomi, inflasi ialah kejadian moneter yang berkaitan dengan fluktuasi kondisi ekonomi serta tingkat suku bunga. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi tetap menjadi

tolak ukur utama untuk menilai perkembangan perekonomian secara agregat. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kenaikan produksi jasa serta barang pada perekonomian, hingga menjadi elemen penting dalam analisis pembangunan ekonomi.

Secara ideal, pertumbuhan ekonomi seharusnya mencerminkan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara luas. Namun, kondisi tersebut hanya dapat terwujud apabila kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibarengi dengan upaya yang efektif dalam mengendalikan inflasi. Tanpa adanya pengawasan terhadap laju inflasi, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi tidak berarti, karena daya beli masyarakat justru akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang diterima masyarakat tidak mampu mengejar kenaikan harga-harga barang dan jasa, sebagaimana terlihat dari tingginya tingkat inflasi yang terjadi (Nuraini, 2017).

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi dinilai berdasarkan peningkatan PDB. Pertumbuhan PDB Indonesia diprediksi akan kembali mencapai angka di atas 6%. Bahkan, sejumlah lembaga internasional misalnya Bank Dunia serta IMF masih menunjukkan pandangan optimis terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 2017, kedua lembaga tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3%, meskipun realisasi pada tahun tersebut hanya sebesar 5,07% (Indiarti, 2018).

Inflasi serta suku bunga tidak selalu memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi inflasi ringan, yakni di bawah 10%, inflasi justru bisa merangsang pertumbuhan ekonomi. Keadaan tersebut disebabkan karena kenaikan harga memberikan dorongan bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan produksi demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Peningkatan produksi tersebut juga berdampak positif pada perekonomian, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja baru (Management, 2020).

Pertumbuhan ekonomi yaitu suatu prosedur perubahan keadaan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan mencapai kondisi yang lebih baik pada rentang waktu tertentu. Pertumbuhan ini ditandai dengan meningkatnya nilai serta volume produksi barang serta jasa yang dinilai dalam suatu periode tertentu. Petunjuk yang umum digunakan untuk mengukurnya antara lain adalah peningkatan pendapatan nasional, kenaikan pendapatan per kapita, total pekerja yang lebih tinggi dibandingkan jumlah pengangguran, dan penurunan jenjang kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara. Secara umum, ketika tingkat inflasi mengalami kenaikan yang signifikan,

hal tersebut cenderung memberikan tekanan negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi, yang kemudian berakibat pada perlambatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila inflasi berada pada level yang rendah, stabil, dan terkendali, kondisi ini justru dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena stabilitas harga memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi, seperti konsumsi, investasi, maupun tabungan.

Selain faktor inflasi, suku bunga juga memainkan peran penting dalam memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi. Perubahan suku bunga dapat berdampak langsung terhadap perilaku konsumsi dan investasi, baik di sektor rumah tangga maupun dunia usaha. Suku bunga yang tinggi dapat menahan laju investasi dan konsumsi karena biaya pinjaman menjadi lebih mahal, sedangkan suku bunga yang rendah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi karena biaya pembiayaan menjadi lebih terjangkau. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan kemampuan nasional dalam menghasilkan barang dan jasa yang diukur berdasarkan perbandingan tahunan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi mencerminkan kenaikan output nasional dari tahun ke tahun, yang mencerminkan perkembangan kapasitas produksi suatu negara serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara agregat.

Salah satu sasaran utama yang ingin dicapai setiap tahun oleh suatu negara adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Tingkat pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai indikator yang sangat penting dalam menilai sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam mengelola dan mengembangkan sistem perekonomiannya. Bagi Indonesia, pencapaian pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti yang sangat penting karena mencerminkan kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperkuat fondasi pembangunan nasional.

Menurut pandangan M. Suparko dan Maria R. Suparko, terdapat sejumlah instrumen atau alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai dan menganalisis tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Instrumen-instrumen ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu serta membantu dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan lebih lanjut, antara lain:

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto atau PDB merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur total nilai produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan

dalam suatu negara selama periode tertentu, berdasarkan harga pasar yang berlaku. PDB sering dijadikan sebagai tolok ukur utama dalam menilai pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun demikian, indikator ini memiliki keterbatasan karena tidak sepenuhnya mencerminkan distribusi kesejahteraan atau tingkat kemakmuran masyarakat secara merata. PDB hanya menggambarkan jumlah output secara agregat tanpa mempertimbangkan apakah pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

b. PDB Per Kapitan atau Pendapatan Per Kapita

PDB per kapita, atau yang biasa disebut juga sebagai pendapatan per kapita, dianggap sebagai indikator yang lebih representatif dalam menilai tingkat kesejahteraan ekonomi suatu negara. Hal ini karena PDB per kapita memperhitungkan jumlah penduduk dalam perhitungannya, yaitu dengan membagi nilai total PDB dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. Hasil pembagian ini memberikan gambaran tentang rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu, sehingga lebih mencerminkan tingkat kemakmuran per orang dalam suatu negara.

c. Pendapatan Per Jam Kerja

Indikator lain yang juga digunakan dalam menilai tingkat kemajuan ekonomi adalah pendapatan atau upah yang diterima pekerja per jam kerja. Tingkat pendapatan per jam dapat mencerminkan produktivitas tenaga kerja serta efisiensi dalam penggunaan waktu kerja. Apabila suatu negara memiliki rata-rata pendapatan per jam kerja yang lebih tinggi untuk jenis pekerjaan yang sama dibandingkan negara lain, maka negara tersebut umumnya dipandang lebih maju secara ekonomi. Hal ini karena pendapatan per jam mencerminkan kemampuan ekonomi dalam memberikan kompensasi yang lebih besar atas waktu dan tenaga yang dikeluarkan oleh para pekerja.

Secara umum, inflasi tidak selalu berdampak negatif terhadap perekonomian. Selama berada pada tingkat yang rendah, yakni di bawah 10%, inflasi justru bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang moderat dapat memotivasi para pelaku usaha untuk meningkatkan produksi karena adanya peluang memperoleh keuntungan lebih besar akibat kenaikan harga. Peningkatan produksi ini juga berdampak positif melalui penciptaan lapangan kerja baru. Namun, ketika inflasi mencapai angka 10% atau lebih, dampaknya mulai bersifat merugikan bagi perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa selama periode waktu tertentu, yang umumnya dihitung

dalam kurun waktu satu tahun. Indikator yang lazim digunakan untuk menilai tingkat pertumbuhan ini adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yang menjadi salah satu parameter penting dalam mengukur sejauh mana suatu negara mengalami kemajuan ekonomi dan mencapai tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Selain mencerminkan peningkatan output nasional, pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis barang dan jasa secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Proses ini tidak terlepas dari peningkatan efisiensi dalam aktivitas produksi, yang biasanya didorong oleh berbagai faktor pendukung seperti perkembangan teknologi, perubahan sistem nilai dan ideologi yang mendasari kegiatan ekonomi, serta adaptasi terhadap metode kerja baru yang lebih sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Simanungkalit, 2020).

Menurut Hakim (2023), pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan yang berkelanjutan pada keadaan perekonomian negara, yang ditandai dengan membaiknya situasi ekonomi dari waktu ke waktu. Siklus pembangunan ekonomi timbul pada saat kegiatan ekonomi saat ini lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi sering ditargetkan mencapai kenaikan PDB sekitar 5% hingga 7% per tahun secara berkelanjutan. Jika suatu negara mampu menjangkau tingkat tersebut, maka bisa dinyatakan bahwasannya pertumbuhan ekonominya berjalan dengan efektif.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang paling umum digunakan untuk menilai tingkat aktivitas ekonomi suatu negara. Indikator ini ditandai oleh adanya peningkatan dalam produksi barang dan jasa, serta membaiknya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai tolok ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan proses pembangunan nasional yang dijalankan oleh pemerintah. Secara konkret, pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam sektor ekonomi, yang terlihat dari bertambahnya volume produksi industri, berkembangnya infrastruktur fisik, serta meningkatnya ketersediaan fasilitas umum. Contohnya meliputi pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan berbagai bentuk prasarana lainnya yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Selain itu, pertumbuhan juga tampak melalui perkembangan sektor manufaktur dan sektor-sektor produktif lainnya yang berperan penting dalam mendorong peningkatan pendapatan nasional dan memperluas kesempatan kerja (Indriyani, 2023).

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan sebagai indikator utama dalam mengukur perkembangan dserta peningkatan perekonomian negara. Laju pertumbuhan

ekonomi mengacu pada tingkat pertumbuhan riil PDB dalam satu tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan deskriptif yang dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggambarkan secara rinci dan menyeluruh fenomena atau permasalahan yang diteliti berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan. Menurut Sugiyono (2016: 9), penelitian deskriptif bertumpu pada paradigma post-positivisme, yang menekankan bahwa realitas sosial dapat dipahami melalui pengamatan terhadap kondisi alami tanpa adanya intervensi atau eksperimen. Dalam konteks ini, peneliti berperan secara aktif sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, di mana keterlibatan dan kepekaan peneliti terhadap konteks menjadi hal yang sangat penting.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teknik triangulasi, yaitu penggabungan berbagai sumber data, teori, atau metode untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap objek penelitian. Selain itu, analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif, yang berarti bahwa temuan-temuan dalam penelitian dikembangkan berdasarkan pola-pola yang muncul dari data, bukan dari hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian tidak difokuskan pada upaya membuat generalisasi yang luas, tetapi lebih diarahkan pada pemahaman mendalam terhadap konteks atau fenomena tertentu yang dianggap penting dan relevan.

Tujuan utama dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap, rinci, dan mendalam mengenai masalah atau topik yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan dengan menyelidiki sebanyak mungkin aspek yang berkaitan dengan individu, kelompok, maupun peristiwa yang relevan. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang diangkat serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan melalui perspektif yang kontekstual dan mendalam.

Dalam penelitian kualitatif, alat penelitian merupakan elemen penting, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk narasi atau pernyataan yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Data dan sumber informasi diperoleh dari literatur seperti jurnal, skripsi, tesis, dan sumber relevan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inflasi dan suku bunga terhadap perekonomian Indonesia. Data yang digunakan merupakan data

sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber-sumber terkait lainnya. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan akan diperkaya dengan teori-teori yang sudah ada serta hasil penelitian sebelumnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Inflasi bisa timbul akibat beberapa aspek, termasuk penambahan permintaan barang, kenaikan biaya produksi, jumlah uang beredar yang berlebihan, serta inefisiensi dalam proses distribusi. Meskipun inflasi umumnya menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara, terdapat pula sisi positifnya. Dampak positif inflasi terutama dirasakan oleh produsen, terutama produsen barang kebutuhan pokok. Walaupun nilai barang mengalami kenaikan, permintaan terhadap produk kebutuhan pokok cenderung tetap tinggi. Produsen berpotensi memperoleh keuntungan yang lebih besar selama periode inflasi karena volume produksi yang tinggi dan harga jual yang meningkat.

Sebaliknya, dampak negatif terhadap perekonomian negara meliputi penurunan kesejahteraan kalangan masyarakat, khususnya mereka yang memiliki pendapatan tetap. Peningkatan harga barang tanpa diikuti peningkatan pendapatan akan mengurangi daya beli kelompok masyarakat ini. Dampak lain yang terlihat adalah peningkatan suku bunga. Apabila terjadi inflasi, institusi keuangan berupaya menjaga stabilitas nilai mata uang, diantaranya dengan meningkatkan jenjang suku bunga. Lebih lanjut, inflasi dapat memperparah penyaluran pendapatan sebab jumlah kelompok yang dirugikan mungkin tidak sebanyak kelompok yang diuntungkan, sehingga menciptakan ketidakmerataan pendapatan dalam suatu negara.

Inflasi juga dipandang sebagai salah satu aspek yang bisa memengaruhi jenjang pertumbuhan ekonomi negara. Penelitian oleh Erika (2020) menunjukkan bahwasannya inflasi memiliki pengaruh negatif kepada pertumbuhan ekonomi, yang berarti kenaikan inflasi cenderung mengakibatkan menurunnya perkembangan serta pertumbuhan ekonomi, begitu juga sebaliknya. Berikut adalah grafik yang menggambarkan jenjang inflasi tahunan Indonesia dari Maret 2020 hingga 2022.



Gambar 1. Tingkat Inflasi

Grafik tersebut mengilustrasikan fluktuasi jenjang inflasi di Indonesia. Pada Maret 2020, tercatat inflasi sebanyak 2,96% secara tahunan (*year-on-year*), yang dipicu oleh dampak pandemi *covid-19*. Puncak inflasi kelihatan pada April 2022, menggapai 3,47% secara tahunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan bahwa inflasi pada April 2022 disebabkan oleh konflik antara Ukraina dan Rusia, yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas di pasar internasional.

Inflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana tergambar dalam grafik pertumbuhan ekonomi, terjadi penurunan signifikan pada periode Maret hingga Juli 2020, mencapai angka -5,322. Lalu, pada periode Oktober sampai awal Januari 2021, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren kenaikan secara bertahap. Pola ini selaras dengan tren penurunan tingkat inflasi yang teramati pada Oktober hingga Januari dalam grafik inflasi sebelumnya.



Gambar 2. Dampak Inflasi

Pada data yang didapat, menunjukkan bahwasannya inflasi berdampak negatif dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia dinilai berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan PDB di Indonesia diprediksi akan lekas kembali pada jenjang titik tertinggi. Perkiraan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selalu optimis yang artinya kebanyakan, kalau sebagian, organisasi internasional serta nasional yang tepat menaksir laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia dalam jangka waktu yang akan datang.

Hasil penelitian Annisa dan kolega menunjukkan bahwasannya jenjang suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) mempunyai koefisien regresi sebanyak 0,159 dengan nilai signifikan 0,022 ($<0,05$). Keadaan tersebut mengimplikasikan bahwasannya ada hubungan positif signifikan antara BI Rate dan jenjang pertumbuhan perekonomian. Dalam hal ini, peningkatan BI Rate cenderung diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya pendaan dan pinjaman, yang berpotensi menekan permintaan kredit khalayak serta menurunkan volume kredit. Kondisi tersebut merupakan salah satu aspek yang memengaruhi inflasi. Kemerosotan suku bunga umumnya diterapkan ketika perekonomian terjadi kemerosotan ekonomi. Sebaliknya, tingkat suku bunga yang tinggi pula bisa menghambat investasi. Dengan demikian, penurunan suku bunga berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi, sementara suku bunga yang rendah dapat mendorong investasi dan selanjutnya memacu pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Frisyelia dan rekan-rekan menyatakan bahwasannya koefisien suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah sebanyak 0,109905. Hasil ini mengindikasikan bahwa suku bunga SBI memiliki dampak buruk pada pertumbuhan ekonomi. Secara spesifik, kenaikan suku bunga SBI sebanyak 1% diprediksi akan menurunkan kenaikan output ekonomi sebesar 0,109905 poin presentase (*ceteris paribus*). Dampak ini sejalan dengan teori ekonomi dan hasilnya signifikan dalam analisis statistik dengan kepercayaan 90%. Tingkat level bunga pinjaman yang kecil cenderung merangsang investasi yang kemudian memberikan kontribusi pada kemajuan ekonomi.

Dalam penelitian uji multikolinearitas seperti yang dilakukan Miralda menunjukkan bahwa variabel tingkat bunga BI berkorelasi dengan intensitas yang cukup tinggi dengan variabel Produk Domestik Bruto (PDB), namun tingkat korelasi masih di bawah 95%, dengan demikian, tidak terdeteksi adanya multikolinearitas. Besaran koefisien regresi terhadap variabel nilai suku bunga BI (X_2) tercatat sebesar -17.453.111,753. Kondisi ini mengindikasikan bahwa nilai PDB akan mengalami penurunan sebesar 17453111,753 setiap peningkatan satu unit pada variabel suku bunga Bank Indonesia, dengan dugaan variabel bebas

lainnya selalu konstan.. Berdasarkan pendekatan korelasi menurut Pearson, diketahui bahwa PDB menunjukkan korelasi negatif terhadap suku bunga Bank Indonesia.

Pada tahun 2016, BI secara nyata menurunkan tingkat suku bunga acuannya. Sebelum berpindah ke BI 7 Days Reverse Repo Rate yang kini terletak diangka 4,75%, BI sudah menjalankan penyusutan suku bunga sebesar total 150 basis poin. Setelah transisi, suku bunga tersebut sempat diturunkan dari 4,50% menjadi 4,25% (penurunan sebanyak 25 basis poin), dan setelah itu kembali pada angka 4,25%, yang juga mengurangi besaran suku bunga asilitas simpanan menjadi 3,50% (penurunan 25 basis poin).

Tahun 2016, total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan biaya yang dipakai menggapai Rp12.406,8 triliun, sementara PDB per kapita tercatat sebesar Rp47,96 juta atau setara US\$3.605.. Pada sisi lain, PDB menurut Harga Konstan (HK) di tahun 2016 mencapai Rp9.433 triliun. Besaran PDB tersebut dilihat dari sudut Harga Berlaku dan Harga Konstan pada 2016 mengalami peningkatan dibandingkan pencapaian pada tahun 2015, yaitu Rp 11.531,7 triliun (HB), Rp8.982, 5 triliun (HK), dan juga dibandingkan tahun 2014 sebesarRp10.569,7 triliun (HB).

Dilihat dari PDB berdasarkan harga berlaku, kondisi ekonomi Indonesia saat tahun 2017 menggapai Rp13.588,8 triliun, dengan PDB per kapita sebesar Rp51,89 juta atau US\$3.876,8. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia mengalami kenaikan yang awalnya 5,03% saat tahun 2016 menjadi 5,07% saat tahun 2017. Berdasarkan sektor produksi, sektor telekomunikasi mencatatkan pertumbuhan paling tinggi sebanyak 9,81% (sumber: www.bps.go.id).

Efek nyata dari perubahan suku bunga pada saat pandemi COVID-19 sesuai dengan kebijakan Lembaga bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) yang mengupayakan penurunan tingkat bunga guna membangkitkan kembali pasar modal di tengah ketidakstabilan yang muncul di masa pandemi. Bank Indonesia juga mengambil langkah serupa di Indonesia, mengurangi suku bunga kebijakan ke tingkat paling rendah sejak awal pandemi pada Maret 2020, pada waktu pandemi covid-19 dinyatakan di Indonesia. Penyusutan suku bunga acuan terakhir oleh BI terjadi pada 19 November 2020. selama tahun 2020, terjadi penurunan dari 4% ke level 3,75% Bank Indonesia telah menurunkan mengurangi tingkat suku bunga acuan hingga lima kali atau sebesar total 125 basis poin.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Merujuk pada analisis serta penjelasan hasil kajian yang sudah dilaksanakan, berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil: Beragam hal dapat memicu terjadinya inflasi, salah satunya adalah kenaikan permintaan barang, kenaikan pengeluaran produksi, jumlah uang beredar yang berlebihan, serta inefisiensi dalam proses distribusi. Dampak positif inflasi cenderung dirasakan oleh produsen, terutama produsen barang kebutuhan pokok, yang berpotensi memperoleh keuntungan lebih besar karena peningkatan volume produksi dan harga jual. perubahan harga dan bunga pinjaman memiliki pengaruh positif terhadap kemajuan ekonomi di Indonesia.

Kemajuan ekonomi tercermin dalam peningkatan kapasitas perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa. Upaya pengendalian kenaikan tingkat harga (inflasi) dan tingkat bunga menjadi esensial sebagai upaya mendorong peningkatan perekonomian. Diperlukan strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan produk dalam negeri dan meningkatkan kemampuan ekspor melewati penyerahan insentif, misalnya penurunan tarif ekspor serta pembatasan impor barang tertentu. Akibat buruk inflasi pada perekonomian negara meliputi potensi penurunan kemakmuran masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan tetap, akibat kenaikan harga barang yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, serta dapat memperburuk ketimpangan pendapatan. Situasi ini mampu mengurangi tingkat konsumsi masyarakat berpenghasilan tetap. Peningkatan tingkat bunga merupakan respons institusi keuangan dalam menjaga stabilitas nilai mata uang selama periode inflasi. Namun, jenjang suku bunga yang tinggi juga berpotensi menghambat penanaman modal. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat mendorong investasi dan selanjutnya memacu pertumbuhan ekonomi. Guna mencapai hasil penelitian yang lebih maksimal mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan, disarankan agar peneliti mendatang mempertimbangkan penggunaan variabel yang telah ada dan mengintegrasikannya dengan variabel tambahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah menyumbangkan dorongan serta bantuan dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih kepada:

1. Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama proses penelitian dan penulisan.

2. Rekan-rekan serta teman yang sudah membantu dengan diskusi, usulan, serta dukungan moral.
3. Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan semangat tanpa henti.

Semoga jurnal ini bisa menyumbangkan bantuan positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR REFERENSI

- Afifani, D. (2022). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia 2016. I-2020. IV (Doctoral dissertation, S1 Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Ahdiat, A. (2022). Inflasi RI April 2022 Tertinggi sejak Awal Pandemi.
- Ambarwati, A. D., Sara, I. M., & Aziz, I. S. A. (2021). Pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB), BI Rate dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2009-2018. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 4(1), 21-27.
- AR, M. Y. (2019). Pengaruh inflasi, kurs, dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi. *Ekombis: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 5(1).
- Ardiansyah, H. (2017). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 5(3).
- Astuty, P., & Rizqia, A. (2021). Pengaruh Modal Asing, Kurs, Inflasi, Suku Bunga Dan Indeks Saham Terhadap Kapitalisasi Pasar Modal Indonesia. *Journal Economics and Strategy*, 2(2), 19-28.
- Aulia, S., Saleh, M., & Roy, J. (2018). Pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman(JIEM)*, 2(3), 38-45.
- Beureukat, B. (2022). Pengaruh suku bunga terhadap inflasi di Indonesia. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(1), 39-46.
- Dwi, Y., & Pasaribu, J. P. K. (2023). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Periode 2013-2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMANAGE)*, 2(1), 131-137.
- Hakim, A. (2023). Pengaruh Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(4), 1283-1291.
- Indiarti, M. (2018). Pengaruh inflasi, suku bunga Bank Indonesia (BI) dan nilai tukar Rupiah/US \$ terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 15(2), 193.
- Indriyani, S. (2016). Analisis pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia tahun 2005–2015. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 4(2), 1-11.

- Kalalo, H. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia periode 2000-2014. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1).
- Kalsum, U. (2017). Pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomikawan*, 17(1), 163065.
- Manik, M. (2022). Pengaruh perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 23(2), 13-20.
- Prasasti, K. B., & Slamet, E. J. (2020). Pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi dan suku bunga, serta terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 30(1).
- Rate dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2009-2018. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 4(1), 21–27. <https://doi.org/10.22225/wedj.4.1.3144.21-27>
- Salim, A., Fadilla, F., & Purnamasari, A. (2021). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 17-28.
- Sari, S., & Ratno, F. A. (2020). Analisis utang luar negeri, sukuk, inflasi dan tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 91-100.
- Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 13(3), 327-340.
- Siregar, S. (2013). *Melode eneliian Kuantitatif Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. Sugiyono. Remaja Rosdakarya. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324>, 4.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi penelitian bisnis & ekonomi*.
- Susanto, S. (2017). Pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *JEBI| Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia*, 12(1), 52-68.
- Tiwa, F. R. (2016). Pengaruh investasi, suku bunga sertifikat bank indonesia (sbi) dan jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2005-2014. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).